

Materi 1
Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Tito Suharto

Nama : Aldi Mulyawan

NIM : 21120119120026

Asal Universitas : Teknik Komputer, Universitas Diponegoro

Kelas : ITS-02

- Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I dibawah kementrian keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan
- Dalam mengemban tugas tersebut, DJP memiliki fungsi:
 1. Perumusan kebijakna di bidang perpajakan
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan
 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
 5. Pelaksanaan administrasi DJP
- Pegawai DJP
 1. Memudahkan pekerjaan dengan adanya satu sistem terintegrasi
 2. Meningkatkan kinerja pegawai dengan fitur yang lebih canggih, andal dan data driven sehingga mengurangi beban kerja manual
 3. Membuka kesempatan bagi pegawai untuk semakin mengembangkan diri pada area kerja yang bernilai tambah tinggi
- Wajib pajak
 1. Mengetahui posisi dan kewajiban perpajakan secara near eal time
 2. Mendapatkan pelayanan secara lebih mudah dan hasil pengawasan yang lebih pasti sehingga mengurangi potensi sengketa
 3. Mengurangi beban kepatuhan wajib pajak
- DJP
 1. Meningkatkan efisiensi dan kinerja administrasi perpajakan
 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, wajib pajak dan pihak ketiga terhadap sistem administrasi perpajakan
 3. Penguatan akuntabilitas melalui automasi proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem informasi kepewagaiwan dan sistem pengawasan kepatuhan internal
- Latar belakang
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) adalah bagian dari program reformasi perpajakan yang berfokus pada pembaruan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh direktorat jendral pajak
- Ruang lingkup
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan meliputi teknologi informasi, proses bisnis, dan basis data melalui pengadaan agen pengadaan (procurement agent), pengadaan sistem informasi pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan perangkat keras
- Pembaruan proses bisnis DJP mencakup 21 proses yaitu :
 1. Pendataan dan ekstensifikasi
 2. Pembayaran dan taxpayer account management

3. Pengelolaan SPT
 4. Layanan dan knowledge management
 5. Pertukaran informasi, data pihak ketiga, dokumen management system, dan data quality management
 6. Business intelligent dan compliance risk management
 7. Pengawasan dan penilaian
 8. Pemeriksaan dan penagihan
 9. Intelejen perpajakan dan penyelidikan
 10. Keberatan dan banding dan non keberatan
- Sepuluh business direction DJP adalah sebagai berikut
 1. Streamlined process
 2. Customer centric approach based on user experience
 3. Open & integrated system
 4. Data & knowledge driven
 5. Digitalized & automated process
 6. Enterprise wide- integrated view of taxpayer
 7. Prudent & accountable
 8. Risk based compliance approach
 9. Omni channels and borderless services
 10. Centralized key capabilities in centers of excellence
 - Proses bisnis
 Untuk mengetahui kinerja proses bisnis DJP saat ini dibandingkan standart internasional good practice, maka DJP telah melaksanakan evaluasi mandiri (self diagnostic) berdasarkan metode TADAT (tax administration diagnostic assesment tool)
 - Tadat adalah sebuah panduan yang menyediakan penilaian objektif terhadap tingkat kesejahteraan komponen komponen utama pada sebuah administrator perpajakan. Berdasarkan TADAT field guide 2015, penilaian dilaksanakan terhadap sembilan performance outcome areas yaitu:
 1. Integrity of the registered taxpayer base
 2. Effective risk management
 3. Supporting voluntary compliance
 4. Timely filling of tax declarations
 5. Timely payment of taxes
 6. Accurate reporting in declarations
 7. Effective tax dispute resolution
 8. Efficient revenue management
 9. Accountability and transparency

Materi 2
Agus Budi Raharjo

- Ruang lingkup pembaruan proses bisnis DJP
 1. Pendaftaran dan ekstensifikasi -> single sign-on
 2. Pembayaran dan taxpayer account management -> fintech
 3. Pengelolaan SPT -> event driven architecture
 4. Layanan dan knowledge management -> knowledge management
 5. Pertukaran informasi data pihak ketiga, document management sistem dan data quality management -> general data protection regulation (GDPR)
 6. Business intelligence dan compliace risk management -> business dan IT gov
 7. Pengawasan dan penilaian -> task fraud detection
 8. Pemeriksaan dan penagihan -> text mining
 9. Intelijen perpajakan dan penyelidikan -> digital forensic
 10. Keberatan dan banding, dan non keberatan -> management information sistem
- Kebutuhan riset DJP – direktorat TIK
 1. Analisis user experience aplikasi e-faktur
 2. Analisis user experience aplikasi e-bupot PPh pasal 23/26
 3. Analisis user experience aplikasi DJP online
 4. Kajian dampak e-faktur terhadap kepatuhan pajak
 5. Kajian dampak e-faktur terhadap penerimaan pajak
 6. Kajian penerapan blockchain pada otoritas perpajakan
 7. Kajian penerapan digital wallet untuk keperluan perpajakan
 8. Kajian penerapan artificial intellegence oleh Otoritas perpajakan
 9. Kajian kepuasan pengguna layanan penyedia jasa aplikasi perpajakan
 10. Kajian dampak penyedia jasa aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak
 11. Kajian biaya kepatuhan paska penerapan digitalisasi oleh otoritas perpajakan
 12. Kajian pengaruh digitalisasi perpajakan pada pemajakan sektor informal
 13. Kajian enelusuran text mining dokumen perpajakan
 14. Kajian pengaruh digitalissasi perpajakan terhadap inklusi perpajakan
 15. Kajian segmentasi wajib pajak berdasarkan utilisasi layanan perpajakan elektronik